

BAB I

PENDAHULUAN

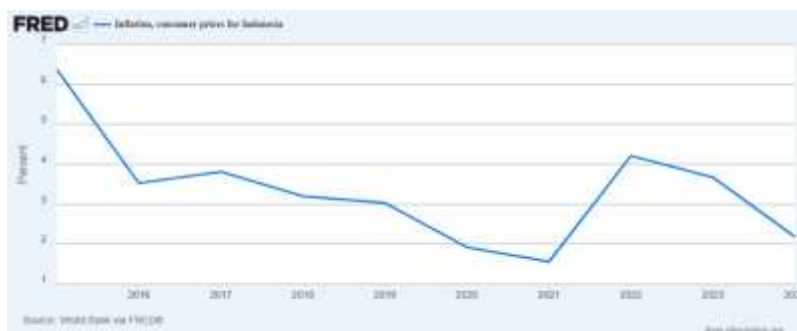
1.1 Latar Belakang

Inflasi didefinisikan sebagai indikator instabilitas makroekonomi yang dicirikan oleh tren kenaikan tingkat harga umum secara persisten. Dampak sistemik dari fenomena ini mencakup depresiasi nilai mata uang yang berdampak langsung pada penurunan kesejahteraan konsumen serta mengganggu keseimbangan fundamental ekonomi suatu negara. Di skala internasional, inflasi sering kali dipicu oleh berbagai faktor, contohnya kebijakan moneter, perubahan nilai tukar mata uang, dan variasi dalam jumlah uang yang beredar.

Faktor-faktor ini dapat makin meningkat akibat peristiwa contohnya krisis ekonomi, pandemi, atau konflik antar negara. Didasarkan data laporan dari World Bank menunjukkan bahwa rata-rata inflasi global di tahun 2022 mencapai 3,5%, dengan negara-negara berkembang mengalami lonjakan inflasi yang signifikan, terutama dipicu oleh kenaikan drastis harga energi dan makanan pasca invasi Rusia ke Ukraina, yang mengganggu rantai pasok global. Pada Indonesia, fenomena ini tercermin dalam dinamika inflasi domestik yang secara historis berkisar pada rata-rata tahunan 3-5% dalam satu dekade terakhir; namun, stabilitas angka ini kerap tergerus oleh tekanan eksternal yang kuat, contohnya eskalasi harga komoditas global khususnya minyak mentah dan gandum atau erosi daya tukar eksternal rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang secara langsung menaikkan biaya impor dan pada akhirnya mendorong kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) di

dalam negeri, memberi suatu petunjuk betapa rentannya ekonomi lokal terhadap guncangan pasar internasional (Sri Setiawati, 2020).

Gambar 1. 1 Tingkatan Inflasi pada indonesia (%)



Sumber: Organization for Economic Co-operation and Development via FRED (diakses pada 25 Januari 2026, pukul 00.10 WIB)

Didasarkan data dari Federal Reserve Economics Data (FRED) memperlihatkan perkembangan inflasi pada indonesia dari tahun 2015 hingga 2024, di mana inflasi mencapai puncaknya pada 8,36% pada bulan september 2015 akibat naiknya harga bahan bakar minyak, kemudian turun menjadi 2,72% di tahun 2019, namun kembali naik menjadi 5,51% di tahun 2022 akibat dampak dari pandemi COVID-19 dan ketidakstabilan di tingkat global. Fenomena ini mengindikasikan bahwa inflasi bukan sekadar masalah yang adanya di tingkatan lokal, tetapi juga berhubungan dengan dinamika ekonomi internasional yang memberi pengaruh kestabilan makroekonomi negara berkembang contohnya Indonesia.

Didalam perspektif teori ekonomi moneter, pergerakan harga tidak adanya secara terpisah, tetapi sebagai respons pada interaksi kompleks antara kebijakan yang diterapkan dan faktor luar. Mengacu pada *Monetary Transmission Mechanism* (MTM) yang diusulkan oleh Mishkin di tahun 1995, suku bunga acuan (*BI 7-Days Reverse Repo rates*) fungsinya sebagai indikator utama untuk memberi kendali

permintaan total, yang bersamaan dengan Teori Kuantitas Uang di mana pertumbuhan jumlah uang yang beredar yang berlebihan bisa menyebabkan tekanan likuiditas. Di samping itu, mekanisme *Exchange Rate Pass-Through* (ERPT) menggambarkan bagaimana fluktuasi nilai tukar (USD/IDR) memberi pengaruh harga domestik melalui inflasi yang berasal dari barang impor.

Secara empiris, kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2015 hingga 2024 menghadapi tantangan besar berupa volatilitas yang tinggi, yang ditandai oleh dampak pandemi COVID-19, ketidakpastian politik global, dan periode pemulihan ekonomi. Kejadian ini menyebabkan distorsi yang signifikan pada indikator makroekonomi yang bisa mengarah pada berubahnya struktural didalam pola hubungan antara kebijakan moneter dan inflasi. Shock eksternal dan kebijakan counter-cyclical yang diterapkan pada bank Indonesia pada saat periode ini diduga sudah mengubah sensitivitas dan efektivitas pengaruh BI7DRR, M1, dan nilai tukar terhadap target inflasi. Situasi ketidakpastian ini memerlukan analisis yang mendalam, karena asumsi stabilitas parameter didalam model ekonomi tradisional sering kali tidak mampu menggambarkan perubahan secara cepat akibat guncangan eksternal itu (Asrinda et al., 2022).

Pada skala global, inflasi tinggi sering kali dikaitkan dengan krisis ekonomi, contohnya Krisis Keuangan Asia 1997, yang memberi suatu petunjuk bagaimana shock eksternal bisa menyebar melalui rantai perdagangan internasional (Prestianawati & Kaluge, 2019). Data dari *International Monetary Fund* (IMF) pada laporan World Economic Outlook 2023 mencerminkan bahwa rerata inflasi dunia terkonsolidasi pada angka 8,7% pada 2022, merupakan konsekuensi dari guncangan ganda (*double shock*) yang dipicu oleh pandemi COVID-19 serta

instabilitas keamanan akibat konflik Rusia-Ukraina yang meningkatkan harga energi dan pangan (Mishchenko et al., 2021). Inflasi yang tidak terkendali bisa mengurangi daya beli masyarakat, meningkatkan biaya hidup, dan bahkan memicu deflasi, contohnya yang adanya di Jepang pada 1990-an. Selain itu, inflasi berkorelasi negatif pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sebagaimana ditunjukkan oleh studi Phillips Curve yang menggambarkan trade-off antara inflasi dan pengangguran, terlepas dari fakta jika versi kontemporer *Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment* (NAIRU) menyatakan jika inflasi rendah (sekitar 2%) yaitu tingkatan stabilitas yang ideal (Romaniello, 2023).

Dalam konteks globalisasi, kebijakan moneter internasional contohnya yang diterapkan oleh Federal Reserve AS atau European Central Bank mempunyai efek spillover, yaitu kenaikan suku bunga AS menarik modal dari pasar emerging, melemahkan mata uang lokal dan meningkatkan inflasi. World Bank menekankan jika stabilitas inflasi yaitu prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan, karena inflasi tinggi bisa memperburuk ketimpangan sosial dan menghambat investasi asing.

Di negara berkembang, inflasi cenderung lebih volatil dan rentan terhadap shock eksternal dibandingkan negara maju karena struktur ekonomi yang bergantung pada komoditas, impor bahan baku, dan ketidakstabilan politik. Asia Tenggara, sebagai wilayah pada pertumbuhan ekonomi tinggi, sering menghadapi inflasi yang dipicu oleh fluktuasi harga komoditas global, contohnya minyak sawit atau beras, serta gejolak nilai tukar akibat ketidakstabilan mata uang regional. Studi dari ASEAN Economic Community (AEC) pada 2022 menunjukkan bahwa rata-rata inflasi di negara-negara ASEAN mencapai 4,5% pada 2021-2022, dengan

Filipina dan Indonesia sebagai yang tertinggi akibat naiknya harga pangan dan energi pasca COVID-19.

Faktor spesifik di negara berkembang termasuk inflasi pangan yang volatile (food inflation), yang bisa mencapai 10-15% selama musim kemarau atau bencana alam, contohnya yang adanya di Vietnam pada 2020. Kebijakan moneter yang efektif, contohnya kendali jumlah uang beredar melalui open market operations atau penyesuaian suku bunga, bisa menstabilkan inflasi, namun tantangan struktural contohnya defisit fiskal dan ketergantungan pada ekspor komoditas sering kali membatasi efektivitasnya. Data dari Bank Dunia mencerminkan bahwa negara-negara Asia Tenggara dengan inflasi diatas 5% cenderung mengalami penurunan pertumbuhan PDB sekitar 0,5-1%, karena inflasi menggerus keuntungan korporasi dan meningkatkan biaya produksi.

Perbandingan dengan negara maju menunjukkan bahwa inflasi di emerging markets lebih sensitif terhadap nilai tukar, di mana pelemahan mata uang dapat langsung meningkatkan harga impor hingga 20-30%, contohnya yang dialami Tailan selama Krisis Baht 1997. Studi empiris oleh (Easterly & Fischer, 2001) dalam jurnal *Economic Development and Cultural Change* menyoroti jika negara berkembang dengan kebijakan moneter independen, contohnya Indonesia, bisa mengurangi volatilitas inflasi melalui koordinasi dengan kebijakan fiskal.

Pada indonesia, inflasi sudah menjadi prioritas kebijakan ekonomi sejak Orde Baru, pada Bank Indonesia (BI) dalam kapasitasnya sebagai regulator moneter yang memegang otoritas penuh atas stabilitas harga. Target inflasi inti BI yaitu 2-4% per tahun, yang didasarkan pada praktik terbaik global untuk mendukung pertumbuhan PDB berkelanjutan dan mengurangi risiko stagflasi (Kementerian

Keuangan Republik Indonesia, 2022). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan bahwa inflasi Indonesia rata-rata 3,5% per tahun selama 2010-2019, namun melonjak menjadi 1,87% pada 2020 akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan gangguan rantai pasokan dan stimulus fiskal besar-besaran (Rahmayani & Putri, 2021).

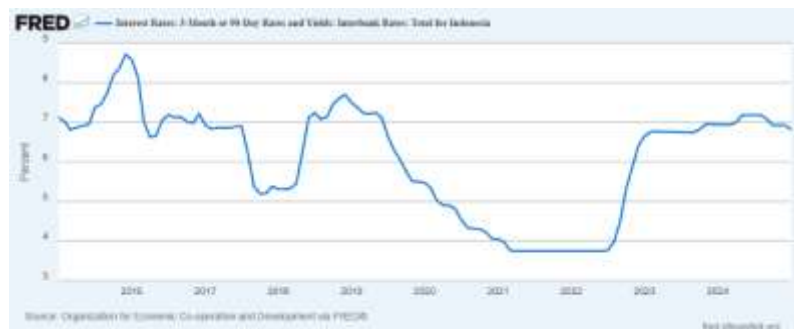
Komponen inflasi Indonesia terdiri dari inflasi inti (core inflation) sekitar 2-3%, yang mencerminkan tekanan permintaan, dan inflasi volatile contohnya harga pangan (beras, cabai) dan energi (BBM), yang dapat naik hingga 10% selama musim kemarau atau naiknya harga minyak global. Faktor struktural contohnya urbanisasi pesat, perubahan iklim yang memberi pengaruh produksi pertanian, dan ketergantungan pada impor bahan pokok membuat inflasi Indonesia rentan terhadap shock eksternal. Misalnya, pada 2022 inflasi mencapai 5,51% akibat naiknya harga energi global pasca-invasi Rusia ke Ukraina (Dani Rizki Rahmadi, 2022).

Menurut (Indonesia Investments, 2022) yang menunjukkan bahwa inflasi tinggi pada Indonesia pernah mencapai 77% pada 1998 selama Krisis Moneter Asia yang memicu kerusuhan sosial dan reformasi ekonomi. Sejak itu, BI sudah memperkuat independensinya dengan UU No. 23 Tahun 1999 untuk fokus di target inflasi. Namun, tantangan contohnya defisit transaksi berjalan dan fluktuasi nilai tukar rupiah tetap menjadi risiko dengan rupiah yang melemah terhadap dolar AS bisa meningkatkan inflasi imported hingga 2%.

Variabel utama didalam penelitian ini BI7DRR (suku bunga acuan Bank Indonesia), jumlah uang beredar (M1), dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS punya suatu hubungan teoritis dan empiris yang kuat dengan stabilitas inflasi. BI 7-*Days Reserve Repo Rate* (BI7DRR) sebagai instrumen kebijakan moneter utama

yang berfungsi untuk mengatur biaya pinjaman dan memberi kendali permintaan agregat; peningkatan BI7DRR bisa menurunkan inflasi dengan mengurangi konsumsi dan investasi, sebagaimana diberi penjelasan didalam model Taylor Rule yang menyarankan penyesuaian suku bunga didasarkan gap inflasi dan output.

Gambar 1. 2 Tren Suku Bunga acuan (BI7DRR)



Sumber: Organization for Economic Co-operation and Development via FRED (diakses pada 16 Desember 2025, pukul 21.27 WIB)

Grafik *BI 7-Days Reserve Repo Rate (BI7DRR)* dari tahun 2015 hingga 2024 memberi suatu petunjuk perubahan dengan cara kebijakan moneter untuk menangani keadaan ekonomi dan inflasi di tanah air. Di awal periode, suku bunga berada disekitar 8-9% antara tahun 2015 dan 2016, mengikuti meningkatnya tekanan inflasi akibat naiknya harga bahan bakar. Sesudah itu, suku bunga mengalami penurunan secara bertahap dan mencapai titik terendah sekitar 3,5% di tahun 2020-2021, dalam rangka memperkuat resiliensi dan normalisasi aktivitas ekonomi pada masa transisi pascadisrupsi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi didalam perekonomian. Namun, sejak tahun 2022, BI7DRR kembali naik signifikan hingga mencapai sekitar 7%, untuk mengatasi lonjakan inflasi yang dipicu oleh penurunan nilai tukar rupiah dan peningkatan harga komoditas global. Pola ini mencerminkan bagaimana Bank Indonesia menggunakan BI7DRR sebagai

alat utama untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sesuai pada teori mekanisme transmisi moneter yang menjadi dasar dalam studi tentang dampak BI7DRR pada inflasi di Indonesia.

Gambar 1. 3 Tren Jumlah Uang Beredar (M1)

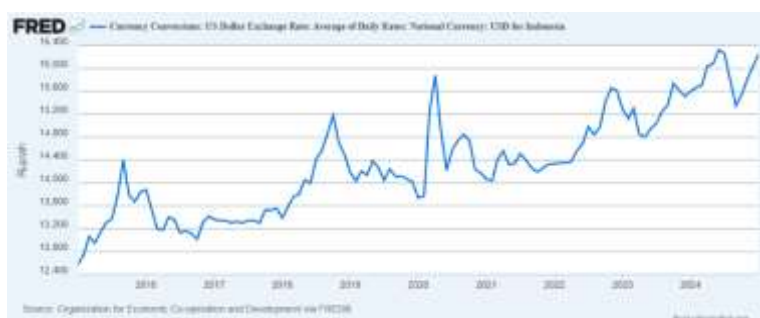


Sumber: Organization for Economic Co-operation and Development via FRED (diakses pada 25 Januari 2026, pukul 00.10 WIB)

Grafik jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) di Indonesia dari pertengahan tahun 2015 hingga akhir tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, persisten, dan signifikan, di mana posisinya tumbuh dari kisaran 1.800 triliun Rupiah hingga menyentuh angka hampir 4.800 triliun Rupiah. Pergerakan kurva ini diwarnai oleh pola fluktuasi musiman (seasonal pattern) berupa lonjakan-lonjakan kecil berkala di setiap pertengahan tahun yang mencerminkan siklus meningkatnya kebutuhan likuiditas masyarakat selama momentum hari raya keagamaan. Akselerasi pertumbuhan M1 terlihat mengalami lonjakan yang jauh lebih curam dan agresif semenjak awal tahun 2020 hingga akhir 2022, yang secara erat terkait dengan bauran kebijakan moneter ekspansif Bank Indonesia, seperti penurunan suku bunga dan injeksi likuiditas berskala besar guna menjaga stabilitas sistem keuangan serta menyokong pemulihan ekonomi nasional

akibat dampak pandemi COVID-19. Memasuki tahun 2023, pergerakan kurva mulai melandai seiring dengan langkah normalisasi kebijakan moneter untuk meredam tekanan harga, di mana fenomena ekspansi likuiditas yang masif sepanjang satu dekade terakhir ini mengindikasikan pentingnya variabel M1 sebagai instrumen fundamental dalam menganalisis transmisi moneter terhadap tingkat inflasi di Indonesia.

Gambar 1. 4 Tren Nilai Tukar (USD/IDR)



Sumber: Organization for Economic Co-operation and Development via FRED (diakses pada 16 Desember 2025, pukul 21.37 WIB)

Grafik pergerakan nilai tukar USD terhadap Rupiah (USD/IDR) antara tahun 2015 sampai 2024 memberi suatu petunjuk penurunan nilai Rupiah yang cukup jelas dibandingkan Dollar AS. Di awal tahun 2015, nilai tukar berada di sekitar Rp12.400 untuk setiap USD, dan secara bertahap meningkat menjadi kira-kira Rp14.300 per USD di tahun 2018, mencerminkan lemahnya kondisi Rupiah. Di tahun 2020, adanya pergerakan yang sangat signifikan dengan lonjakan hampir mencapai Rp16.000 per USD, yang diduga disebabkan oleh tekanan ekonomi global akibat pandemi COVID-19 serta fluktuasi di pasar keuangan internasional. Sesudah lonjakan itu, nilai tukar memberi suatu petunjuk penguatan kecil dan berada di rentang Rp14.000 hingga Rp15.000 per USD di tahun 2021 hingga awal 2022, sebelum kembali melemah ke angka lebih dari Rp16.000 per USD di tahun 2023-2024. Pola ini memberi suatu petunjuk adanya tekanan yang terus menerus

terhadap Rupiah yang diberi pengaruh pada berbagai faktor eksternal contohnya ketidakpastian di pasar global, defisit neraca berjalan, serta perubahan suku bunga di Amerika Serikat.

Depresiasi Rupiah terhadap *Greenback* (USD) memberi pengaruh inflasi melalui mekanisme *Exchange Rate Pass-Through* (ERPT), yang menggambarkan derajat dan kecepatan transmisi perubahan nilai tukar terhadap harga domestik. Dalam kerangka ini, pelemahan (depresiasi) rupiah secara langsung meningkatkan biaya barang impor (imported inflation), khususnya pada komponen bahan baku dan energi, yang kemudian diteruskan oleh produsen ke konsumen. Fenomena ini dipertegas oleh (Ramdhani, 2024), yang menyatakan jika depresiasi nilai mata uang menyebabkan naiknya harga barang konsumsi yang diimpor, contohnya gandum, kedelai, dan bahan bakar minyak (BBM). Studi itu menyoroti jika fluktuasi nilai tukar menciptakan dilema bagi otoritas moneter karena dampak imported inflation yang ditimbulkannya tidak hanya membebani biaya hidup masyarakat, tetapi juga memaksa Bank Indonesia untuk merespons dengan kebijakan suku bunga guna menjaga stabilitas pasar keuangan dan mencegah pelarian modal (capital outflow) yang sangat dalam.

Meskipun ketiga variabel moneter ini secara teoritis punya suatu hubungan yang jelas dengan inflasi, dinamika empiris pada Indonesia memberi suatu petunjuk kompleksitas yang memerlukan uji lebih lanjut, terutama didalam menghadapi guncangan ekonomi global. Bank Indonesia menggunakan BI 7-Days Reverse Repo rates (BI7DRR) untuk memberi kendali inflasi, namun efektivitas transmisi kebijakan moneter (MTM) melalui jalur suku bunga, kredit, dan nilai tukar dapat terdistorsi oleh faktor eksternal. Secara spesifik, penelitian dari (Gerko & Rey,

2017) mengindikasikan adanya siklus keuangan global yang didorong oleh kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed). Kebijakan *hawkish* The Fed bisa memicu pengetatan kondisi keuangan global, menarik modal keluar dari negara berkembang contohnya Indonesia, dan pada akhirnya memberi tekanan depresiasi kuat pada Rupiah. Tekanan ini berpotensi melemahkan efektivitas BI7DRR didalam memberi kendali inflasi, sekaligus memperkuat jalur *imported inflation* melalui depresiasi nilai tukar.

Studi ini mengadopsi metodologi kuantitatif dengan mengimplementasikan estimasi regresi linear berganda atau *ordinary Least Squares* (OLS) untuk memberi kepastian jika model regresi memenuhi karakteristik statistik yang diperlukan agar hasil estimasi bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Uji normalitas dipakai sebagai memberi kepastian jika residual model terdistribusikan normal, suatu syarat penting untuk validitas uji statistik parametrik. Selanjutnya, uji multikolinieritas diterapkan untuk melihat apakah variabel independen, yaitu BI7DRR, M1, dan nilai tukar, mempunyai korelasi yang terlalu tinggi satu sama lain. Eksistensi multikolinieritas yang ekstrem berpotensi mendistorsi stabilitas parameter estimasi, sehingga mengaburkan akurasi interpretasi mengenai kontribusi spesifik masing-masing prediktor dalam menghasilkan daya determinasi pada model estimasi. Uji heteroskedastisitas juga diproyeksikan untuk mendeteksi apakah adanya ketidaksamaan *varians* pada residual model dengan keberadaan heteroskedastisitas bisa menyebabkan varians estimasi menjadi bias. Selain itu, uji autokorelasi, contohnya Durbin–Watson, dipakai sebagai mengidentifikasi adanya korelasi antara residual satu periode pada

periode lainnya yang sering muncul pada data deret waktu. Apabila asumsi klasik tidak terpenuhi, model regresi bisa menghasilkan hasil estimasi yang tidak reliabel.

Justifikasi penelitian ini yaitu untuk memberi kontribusi akademik dan praktis, contohnya rekomendasi kebijakan bagi BI didalam mengoptimalkan BI7DRR untuk menangkal dampak M1 berlebih dan fluktuasi nilai tukar. Dengan mengisi gap ini, penelitian diharapkan mendukung stabilitas ekonomi Indonesia, mengurangi risiko inflasi tinggi, dan meningkatkan efektivitas kebijakan moneter di tengah tantangan global contohnya perubahan iklim dan geopolitik. Data dari BI dan BPS akan dipakai sebagai analisis, memberi kepastian validitas dan relevansi hasil.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) yang membedakannya secara signifikan dari studi-studi sebelumnya yang akan memakai rentang waktu pengamatan yang sangat relevan, yaitu dari tahun 2015 hingga 2024. Periode ini sangat penting karena mencakup perubahan dalam ekonomi yang tidak secara lengkap dijelajahi dalam riset sebelumnya, contohnya peralihan kebijakan moneter dari BI Rate ke BI7DRR di tahun 2016, masa stimulus moneter yang besar-besaran akibat pandemi COVID-19, hingga dampak inflasi global yang diakibatkan oleh konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan lonjakan harga energi dan makanan. Selain keunikan data, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengatasi kekosongan penelitian yang muncul dari ketidakselarasan temuan antara peneliti sebelumnya; contohnya, ada perbedaan hasil mengenai dampak nilai tukar pada inflasi antara penelitian Asri dan Iryani (2023) yang menyimpulkan tidak signifikan dan studi Fauziah dan Amaliah (2024) yang mengemukakan kebalikannya. Dengan mengkombinasikan tiga teori utama, yaitu Monetary Transmission Mechanism,

Quantity Theory of Money, dan Exchange Rate Pass-Through dalam satu model *Ordinary Least Squares* (OLS), penelitian ini berkontribusi untuk memvalidasi kembali variabel mana yang paling punya pengaruh terhadap stabilitas harga pada indonesia didalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global selama sepuluh tahun terakhir.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *BI 7-Days Reserve Repo rates* (BI7DRR) berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia?
2. Apakah Jumlah Uang Beredar (M1) berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia?
3. Apakah Nilai Tukar (USD/IDR) berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Didasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *BI 7-Days Reserve Repo rates* (BI7DRR) terhadap inflasi pada indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Uang Beredar (M1) terhadap inflasi pada indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh Nilai Tukar (USD/IDR) terhadap stinflasi pada indonesia.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini mengandalkan basis data sekunder yang diklasifikasikan sebagai data *time series*. Informasi empiris dalam studi ini dioperasionalkan melalui

pemanfaatan data sekunder yang mencakup BI 7 Days Reserve Repo rates (BI7DRR), Jumlah Uang beredar (M1), Nilai Tukar, dan Inflasi pada Indonesia pada periode tahun 2015 hingga tahun 2024 yang diolah secara mandiri berdasarkan data Bank Indonesia serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Penelitian ini juga ditunjang oleh penelitian terdahulu yang merujuk pada data-data Instrumen Kebijakan Moneter dan Inflasi pada Indonesia yang relevan. Model didalam penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel yaitu BI 7 Days Reserve Repo rates (BI7DRR), Jumlah Uang beredar (M1), Nilai Tukar, dan Inflasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diintensikan untuk menjadi stimulan intelektual yang berdaya guna bagi para pemangku kepentingan, antara lain:

1.5.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi penting bagi literatur ekonomi moneter melalui uji empiris yang menyeluruh terhadap tiga teori dasar dalam konteks perubahan ekonomi Indonesia antara tahun 2015 - 2024. Secara khusus, stupada ini akan mendalami analisis Monetary Transmission Mechanism (MTM) untuk menilai seberapa efektif jalur suku bunga (BI7DRR) didalam memberi pengaruh permintaan total, mengeksplorasi relevansi Quantity Theory of Money didalam memberi penjelasan tekanan inflasi yang disebabkan oleh kelebihan likuiditas (M1), serta memvalidasi mekanisme *Exchange Rate Pass-Through* (ERPT) yang memberi penjelasan bagaimana fluktuasi nilai tukar berdampak pada harga domestik.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Bank Indonesia (BI):

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi landasan bagi Bank Indonesia untuk memperkuat strategi dalam kebijakan suku bunga, operasi pasar terbuka, serta pengelolaan likuiditas (M1). Penelitian ini juga memberi data empiris tentang sejauh mana perubahan dalam kebijakan moneter, contohnya peningkatan BI7DRR selama 2022–2023, bisa menstabilkan inflasi atau malah mengindikasikan adanya jeda waktu didalam proses transmisi kebijakan moneter pada indonesia.

2. Bagi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Bappenas)

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi landasan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter didalam mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kestabilan harga. Temuan yang didapatkan bisa mendukung penyusunan kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan subsidi, pengawasan harga pangan, dan manajemen nilai tukar agar sejalan pada sasaran kebijakan moneter yang ada pada bank Indonesia didalam menciptakan stabilitas makroekonomi yang berkelanjutan.

3. Bagi Pelaku Sektor Keuangan dan Investasi

Penelitian ini menyajikan wawasan empiris tentang bagaimana inflasi merespons perubahan BI7DRR dan nilai tukar, yang bisa digunakan dalam strategi pengelolaan risiko serta pemilihan portofolio investasi. Di samping itu, temuan penelitian ini juga fungsinya sebagai acuan bagi lembaga keuangan dan investor didalam memperkirakan arah suku bunga dan nilai tukar sebagai petunjuk keadaan moneter jangka menengah pada indonesia.

4. Bagi Masyarakat dan Dunia Usaha

Penelitian ini membedah determinasi kebijakan moneter terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok guna mengidentifikasi konsekuensinya terhadap gradasi kemampuan beli masyarakat di tingkat domestik. Di samping itu, hasil dari penelitian ini juga bisa bermanfaat bagi para agen ekonomi di sektor riil untuk memperkirakan biaya produksi, menetapkan harga jual, serta merancang strategi pembiayaan yang sesuai pada kebijakan moneter yang ada pada bank sentral.